



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda, Persil Nomor 1, Jakarta timur 13220, Telp. 021-4892802,
Website : www.lapan.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR : 501/HM.01/04/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-04-2019), bertempat di LAPAN Pusat, Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
N I P : 19620123 198703 1 002
Jabatan : Kepala

2. N a m a : Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih
N I P : 19631108 198901 2 001
Jabatan : Sekretaris Utama

3. N a m a : Dr. Rika Andiarti
N I P : 19670130 198701 2 001
Jabatan : Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa



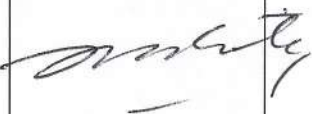


4. N a m a : Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.
N I P : 19620126 198703 2 001
Jabatan : Deputi Bidang Penginderaan Jauh

5. N a m a : Drs. Afif Budiyo, MT.
N I P : 19590127 198702 1 001
Jabatan : Deputi Bidang Sains Antariksa, dan Atmosfer

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Lapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dengan rincian informasi yang dikecualikan sebagai terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal bagian Berita Acara ini.

TIM UJI KONSEKUENSI

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Thomas Djamaluddin	Kepala	
2.	Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih	Sekretaris Utama	
3.	Dr. Rika Andiarti	Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	
4.	Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	
5.	Drs. Afif Budiyono, MT.	Deputi Bidang Sains, Antariksa, dan Atmosfer	

LAMPIRAN
 BERITA ACARA
 UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN
 NOMOR

No	Materi/Informasi Publik Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	Jangka Waktu Informasi yang dikecualikan	Hasil Evaluasi
		Pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat	Peraturan dangan Lainnya				
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil general check up kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan tim etika, biodata elektronik pegawai (database), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin	Huruf h.	UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Kepegawaian	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Dan atau pengungkapan jabatan seseorang dalam jabatan publik	Masih Relevan

	perkawinan/ perceraian						
2	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6: daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah bersifat rahasia	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan	Kepegawaian	Mutlak/tidak terbatas	Masih Relevan
3	Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i.		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN	Ketatausahaan	Mutlak/ tidak terbatas kecuali atas perintah Pengadlian/ Komisi Informasi	Masih Relevan
4	Dokumen kerjasama LAPAN termasuk dokumen teknis milik vendor yang memiliki nondisclosure agreement	Huruf i dan j		Adanya tuntutan dari pihak yang bekerjasama	Kerja sama	Sampai dengan dikeluarkan kebijakan dan mendapat izin dari para pihak	Masih Relevan
5	Draf kerja sama yang belum selesai (dalam pembahasan)	Huruf i dan j		Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Kerja sama	Sampai dengan dikeluarkan kebijakan dan mendapat izin dari para pihak	Masih Relevan
6	Dokumen terkait pendaftaran Hak atas Kekayaan	Huruf b	Pasal 3 UU No. 14 tahun 2001 tentang paten	Mengganggu perlindungan HAKI	HAKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan	Masih Relevan





	Intelektual (HaKI)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	habis	Masih Relevan
7	Dokumen Jenis komponen dan jenis alat uji (merk, model roket)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
8	Data propelan (dasar perancangan, komposisi, karakteristik, geometri rinci grain)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
9	Desain dan cetak biru Roket dan satelit	Huruf b, c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
10	Dokumen Laboratorium dan peralatan proses propelan	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
11	Dokumen pembuatan dan evaluasi hasil pengujian roket dan satelit beserta hasil evaluasi	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Penambahan diksi

12	Software, subsistem/sistem untuk satelit, ruas bumi, roket, dan LSU	Huruf c, i		Mengganggu proses penelitian	Pendukung Litbang	Sampai batas penelitian selesai	Masih Relevan
13	Data TT & C Satelit LAPAN/ Indonesia	Huruf b, c	UU No. 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta	Keamanan dan keselamatan satelit terkait pembajakan satelit oleh pihak lain	Pendukung Litbang	Minimum 25 tahun	Masih Relevan
14	Peta Citra satelit untuk keperluan strategis Hankam	Huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Produk Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
15	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf i dan j	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf b dan Perpres no. 70 tahun 2012	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai ditetapkan pemenang lelang	Masih Relevan
16	Dokumen kontrak	Huruf i dan j	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf b dan Perpres no. 70 tahun 2012	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pengadaan Barang dan Jasa	Mutlak/ tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penegakan hukum	Masih Relevan

17	Dokumen usulan peserta lelang pada saat lelang berlangsung	Huruf i	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf b dan Perpres no. 70 tahun 2012	Mengganggu proses pelelangan	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai dengan ditetapkannya pemenangnya lelang	Masih Relevan
18	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM, SP2D)	Huruf j	UU No. 7 tahun 1992 jo. UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 28, pasal 40	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Keuangan	Sampai batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Masih Relevan
19	Naskah pedoman delegasi RI di forum internasional UNCUCPOUS	Huruf i, f	UU no. 37 tentang hubungan luar negeri	Mengganggu kerahasiaan negara	Lain-lain	Sampai dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri dapat menjadi informasi yang terbuka untuk umum	Masih Relevan
20	Dokumen topologi data center	Huruf j	UU no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Tindak kriminal dan pencurian data	Lain-lain	Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan
21	Daftar Internet Protocol (IP) address yang bersifat lokal	Huruf j	UU no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/ penyalahgunaan akses		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan

22	Dokumen sistem manajemen database	Huruf j	UU no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan
23	Kode akses elektronik	Huruf j	UU no 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/ penyalahgunaan oleh pihak lain		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan

Jakarta, 1 April 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Thomas Djamaluddin	Kepala	
2.	Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih	Sekretaris Utama	
3.	Drs. Afif Budiyo, MT.	Deputi Bidang Sains, Antariksa, dan Atmosfer	
4.	Dr. Rika Andiarti	Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	
5.	Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	